

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Banyak pakar memberikan makna pendidikan diantaranya, secara terminologi, pendidikan diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang (pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 1989). Dengan pendidikan, diharapkan terbinanya para peserta didik agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik. Secara yuridis formal, tujuan pendidikan nasional dalam pasal 4 undang-undang tersebut (1990 : 194) dinyatakan sebagai berikut :

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan di atas harus dijadikan acuan oleh setiap penyelenggara pendidikan termasuk guru di dunia persekolahan. Oleh karenanya, penyelenggara pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin agar tujuan tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, hal ini dipertegas lagi dalam GBHN 1999 tentang misi bangsa Indonesia (1999 : 71) yang mengatakan bahwa :

Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

Uraian di atas mengisyaratkan adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah dan orang tua, dalam upaya mewujudkan tujuan dan misi tersebut. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan secara sepihak tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Dilihat dari berbagai komponen penyelenggara pendidikan di atas, sekolah merupakan lembaga formal yang utama dalam proses pendidikan. Oleh karena dalam sekolah itulah penyelenggaraan pendidikan diupayakan sedemikian rupa secara formal dalam rangka mengupayakan pencapaian tujuan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi.

Sekolah Menengah Umum (SMU) sebagai salah satu lembaga pendidikan formal, secara institusional memiliki kewajiban untuk mengembangkan tujuan yang bersifat kelembagaan. Tujuan institusi dimaksud sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1990 (1990 : 52) sebagai berikut :

Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan pengetahuan, teknologi dan kesenian, dan b) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Rumusan tujuan-tujuan pendidikan tersebut merupakan amanat yang harus diimplementasikan dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Demikian pula halnya dengan PPKn, PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang harus diberikan pada setiap jenjang pendidikan (Pendidikan Dasar dan Menengah) mempunyai tugas yang sama dalam upaya mencapai tujuan pendidikan di atas. Secara khusus, PPKn merupakan salah satu wahana

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari siswa baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa" (Depdikbud, 1995 : 1)

Kutipan tersebut menegaskan bahwa mata pelajaran PPKn tidak hanya mengembangkan aspek pengetahuan semata, akan tetapi berupaya untuk mengembangkan sikap dan perilaku siswa. Disamping itu, PPKn juga sebagai wahana dalam membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus sehingga terbentuk sikap dan perilaku siswa yang didasari nilai-nilai luhur Pancasila. Perilaku yang dimaksud adalah seperti yang tercantum di dalam penjelasan UU SPN No. 2 Tahun 1989 pasal 39 ayat 2 (1990 : 233) berikut :

Perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan Agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa banyak perilaku yang harus dilakukan oleh para siswa setelah mempelajari mata pelajaran PPKn. Perilaku tersebut pada dasarnya merupakan cerminan sila-sila dari Pancasila. Hal ini dipertegas lagi oleh tujuan PPKn yang menurut (Depdikbud 1995 :2)

Untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa yang merupakan tuntutan utama pelajaran PPKn adalah upaya pengamalan nilai-nilai Pancasila, agar bisa dihayati dan diamalkan secara benar dan konsekuen serta dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu guru PPKn dituntut untuk lebih dapat berperan, artinya ia tidak hanya menyampaikan pengetahuan, akan tetapi ia juga dapat mengembangkan nilai-nilai moral yang tercantum di dalamnya. Guru PPKn harus mengakomodasikannya dalam proses belajar mengajar dengan jalan menjabarkan serta mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.

Kewajiban guru untuk mengembangkan kurikulum, secara khusus juga tercantum dalam kurikulum dan GBPP PPKn 1994 (1995 : 4) yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahan pelajaran yang tertuang di dalam bagian uraian merupakan bahan minimal yang harus diperkaya guru dengan bahan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada waktu proses belajar mengajar berlangsung, b) dalam melaksanakan proses belajar mengajar, guru bebas memilih strategi belajar mengajar yang tepat.

Dari uraian di atas, tampak bahwa dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya semata-mata menyampaikan materi yang terdapat dalam kurikulum, akan tetapi ia juga dituntut untuk memperkaya dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut termasuk pula dalam merumuskan program pengajaran dan mekanisme strategi belajar mengajar yang relevan sesuai dengan materi yang akan diajarkan pada kelas dan semester yang telah ditetapkan.

Dengan berbagai upaya dan kemampuan guru tersebut, diharapkan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dapat mengembangkan nilai

moral sekaligus mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh para siswa baik dalam hal pengetahuan, sikap maupun perilakunya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, yang secara khusus bagi mata pelajaran PPKn adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral Pancasila terutama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan hukum yang diambil dari pokok bahasan toleransi, menghargai dan kedisiplinan.

Tugas dan tanggung jawab guru dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut tampaknya tidak mudah, bahkan bisa dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Mengenai pentingnya nilai moral terutama yang berkaitan pendidikan budi pekerti di dunia persekolahan, pada tahun 1960-an telah ditetapkan secara khusus. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Azis Wahab (1999 : 4) bahwa : pendidikan budi pekerti yang diterapkan di sekolah sampai tahun 1960 merupakan tipe yang mendasar dari pendidikan moral orang Indonesia yang memusatkan pada pengajaran yang menuntun cara berperilaku yang baik di masyarakat.

Salah satu mata pelajaran yang saat ini mempunyai tujuan membina budi pekerti adalah mata pelajaran PPKn. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dengan pelajaran PPKn diharapkan terbinanya para siswa agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Secara khusus, hal tersebut tersirat pada kurikulum SMU 1994 GBPP PPKn (1994 : 2) yang menyatakan bahwa :

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dimaksudkan pula membekali para peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara

yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Oleh karenanya, jelaslah bahwa guru PPKn harus berupaya sedemikian rupa agar didalam proses belajar mengajar selalu mengembangkan seluruh potensi anak didik baik dalam hal pengetahuan, sikap maupun perilakunya sehingga terwujud nilai moral dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Untuk tujuan tersebut diatas maka PPKn sebagai pendidikan nilai moral harus memiliki strategi dan pendekatan dalam proses belajar mengajar menurut Kosasih Djahiri (1988 :6)(1)Pengajaran hendaknya bersifat siswa sentris (student centered = student based). Dalam pengertian ini guru harus mampu membaca. Memahami hal ikhwal keadaan siswa serta selalu memperhatikan keadaan, kesukaran, keberhasilan, kemampuan siswa baik disaat merancang pelajaran maupun pada waktu proses belajar mengajar berlangsung.(2) Perlu penerapan pendekatan humanistik suatu pola berpikir dan pola kerja yang meminta agar guru menghargai siswa sebagai manusia yang potensial, menghargai dan melayani siswa secara jujur, objektif, hangat, terbuka dan bebas tanpa paksaan, menciptakan suasana kelas yang akrab kekeluargaan, bebas bagi perasaan anak untuk tanpa ragu mengekspresikan emosi dan pendapatnya sehingga ada keterbukaan dan kesiapan kemampuan untuk belajar. (3) Penerapan proses belajar mengajar CBSA (cara belajar siswa aktif) (4) Proses belajar mengajar yang menerapkan azas multi metode dan multi media, multi evaluasi dan multi sistem. (5) Proses belajar mengajar dengan belajar kelompok.

Hal tersebut diatas dimaksudkan bahwa pendidikan jika dipersepsikan sebagai alat enkultursi umat manusia, maka segala bentuk atau unsur

pengaruh dari perubahan sosial juga melanda dunia pendidikan oleh karena institusi pendidikan (sekolah) sangat erat hubungan dengan kondisi masyarakat yang harus dibudayakan, maka fungsi ganda sekolah yaitu sebagai cermin cita-cita masyarakat dan pada saat tertentu menjadi agent of social change, mencambuk kemunduran dan keterbelakangan masyarakat itu sendiri, pada hakekatnya adalah fungsi ganda yang sangat penting dalam modernisasi masyarakat.

Jika pendidikan dalam institusinya menjadi statis karena kehilangan homisasi kulturalnya (sebagai pusat pembudayaan) maka proses modernisasi akan mengalami stagnasi (mandeg). Bila sebaliknya jika pendidikan dengan institusinya bergerak dinamis serta inovatif, masyarakat akan terpengaruh daripadanya. Jadi sebenarnya antara sekolah dengan dinamika masyarakat berada dalam kompetisi ideal dan moral bagi kehidupan yang dicitakan

Seorang ahli pendidikan Islam Tunisia, Guru Besar Universitas Tunis, Dr Fadhil al Jamali, menghimbau agar umat Islam menciptakan sistem pendidikan yang berdasarkan keimanan kepada ALLAH, karena hanya dengan iman yang benariah yang menjadi dasarnya pendidikan yang benar dan yang dapat memimpin kita kearah usaha mendalam dan menstudi tentang kebenaran dari ilmu pengetahuan, sedang ilmu pengetahuan yang benar adalah memimpin kita kearah amal shaleh.

Pada masa ini pendidikan (sekolah sebagai bentuknya) berada dalam arena kompetisi pengembang iptek, terutama dibidang industrial, yang berusaha mendikte pendidikan agar bersedia menjadi sumber pemenuh dunia industrial. Hal demikian digambarkan oleh seorang ahli psikologi dan



pendidikan pragmatis Amerika Serikat mengatakan bahwa pendidikan ini hanya dijadikan cabang dari teknologi ilmiah yang dipentingkan.

Sistem pendidikan seperti diharapkan oleh masyarakat harus berfungsi sebagai pusat pembudayaan manusia yang mengarahkan kemajuan hidup yang sejahterah. Pendidikan menurut citra ahli iptek, baru akan berhasil guna dan berdaya guna serta tepat guna jika mau dijadikan sumber pengembangan iptek oleh karena itu ia harus berproses secara teknologis untuk mencapai tujuan atau produk yang seirama dengan kemajuan industrial teknologis itu sendiri. Nilai-nilai dari manapun sumbernya tidak dilibatkan dalam proses tersebut karena iptek bebas dari nilai baik moral ataupun spiritual.

Sementara ilmuwan dibidang pendidikan lainnya seperti : Ivan Lich, tidak memandang sekolah diperlakukan oleh masyarakat , maka masyarakat dijaukan dari sekolah. Pada hal masih terbukti bahwa masyarakat modern yang elah berada dalam tingkat hidup post industrial tetap mengharapkan sekolah menjadi pusat pembudayaan masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga kebudayaan masyarakat masa lampau seraya melihatnya secara kritis perlunya membangun dan mencari lembaga kebudayaan baru dengan nilai-nilai yang baru untuk mencapai tujuan hidup baru. Pendidikanlah yang diandalkan dapat memecahkan problem itu.

Belajar disekolah harus praktis (refleksi dan aksi) terhadap sistem mikanisme alamiah kita. Anak didik harus dihadapkan kepada realitas secara kritis yang secara simultan menganalisa sasaran dan berbuat terhadap realitas itu. Jika pendidikan hanya mengajarkan persepsi terhadap realitas yang tidak diikuti dengan intervensi secara kritis akan tidak membawa kearah transformasi

nilai-nilai objektif dan realitas itu. Pandangan ilmuwan kependidikan diatas menunjukkan adanya perubahan dalam masyarakat tentang nilai-nilai yang membawa konflik ke dalam dunia pendidikan.

Masing-masing mereka melihat dari segi-segi kelemahan dan kekuatan sekolah sebagai lembaga pembudayaan masyarakat. Tendensi dari perubahan demikian, sumber antara lain yang terpenting adalah kemajuan iptek modern disatu pihak dan dipihak lain adalah tuntutan hidup manusia yang makin besar dan kompleks yang cenderung ke arah pragmatis dan materialisme kehidupan.

Jadi dapat dikatakan bahwa posisi lembaga pendidikan saat ini sedang berada dalam arena konflik nilai-nilai yang membawa keada transisi nilai kehidupan, baik spiritual maupun moral etik yang amat sensitif terhadap sentuhan-sentuhan nilai hedonistik (kenikmatan hidup) materi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sekolah perlu bersikap percaya pada diri sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu membudayakan masyarakat dengan nilai-nilai ideal yang mampu menjadi fondasi moral spiritual bagi tegaknya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera dan bahagia rohaniah dan jasmaniah.

Inilah misi lembaga pendidikan dalam menghadapi modernisasi yang harus berperan interaktif antara pengaruh kekuatan ideal dari dalam dengan pengaruh realistik dan pragmatis dari luar. Peran itu baru berfungsi dengan baik jika para guru dan pengelolaan pendidikan itu sadar terhadap tugasnya dalam mendidik.

Di Indonesia Sekolah berperan sangat penting dalam pendidikan karena mempunyai pengaruh besar terhadap siswa peserta didik. Sekolah



berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi siswa (Ahmadi: 1981: 181). Disamping itu kalau dilihat dari tujuan pendidikan nasional

menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional bertujuan : mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional di atas, untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, proses pendidikan harus berorientasi kepada internalisasi nilai moral dan nilai agama.

Pendidikan tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, tetapi juga mengembangkan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan nilai-nilai, cakupan ranah pendidikan nilai ini sangat luas, bahkan merupakan wilayah inti pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang hanya bertujuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi atau keterampilan tanpa landasan dengan nilai-nilai (sikap) yang positif dan yang sesuai dengan keyakinan dan norma yang berlaku di masyarakat, maka proses tersebut bukan proses pendidikan. Dengan demikian hakekat pendidikan berupaya internalisasi sistem nilai kehidupan yang universal.

Nilai merupakan suatu konsepsi yang telah terargumentasi dan terintegrasi yang mempengaruhi perilaku anak dalam hubungannya dengan manusia dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam sekitarnya. (Imran Manan: 1989:18).

Munculnya berbagai masalah dan isu-isu global seperti pelanggaran hak azasi manusia (HAM) dalam bentuk kekerasan, realitas, konflik antar etnik,

konflik agama, merusakkan lingkungan hidup, renggangnya perdamaian dunia, mau tidak mau akan memaksa para praktisi pendidikan menemukan sistem pendidikan yang sesuai untuk menjawab tantangan zaman.

Krisis nilai yang dialami para peserta didik itu terjadi karena beban kurikulum terlalu padat, setiap hari guru dan murid selalu merasa dikejar-kejar waktu hanya untuk menyelesaikan program yang diamanatkan oleh kurikulum, guru merasa perlu memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, tetapi karena yang disampaikan kepada murid mencakup banyak hal akhirnya mereka dapatkan hanya sepotong-sepotong. Bahan pelajaran sering diberikan secara parsial tidak utuh.

Siswa menjadi sulit mencari makna yang dikandung didalam bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Hal yang lebih menyedihkan lagi bahwa semua yang dipelajari di bangku sekolah ternyata tidak integrited dengan kehidupan sehari-hari bahkan tidak jarang sama sekali tidak cocok dengan realitas sehari-hari. Di sini terjadi semacam inkonsistensi antara apa yang diajarkan guru dengan pengalaman sehari-hari.

Praktisi pendidikan diharapkan melakukan reorientasi atas rumusan-rumusan baku tentang maksud dari tujuan pelaksanaan pendidikan nasional. Kendala yang dihadapi adalah rumusan tujuan pendidikan terlalu tinggi dan muluk maka susah penjabarannya. Desakan segera mengadakan reorientasi atas tujuan, pendidikan Nasional karena kita sekarang ini tengah menghadapi berbagai persoalan berat menyangkut eksistensi sebagai suatu bangsa.

Pada konteks inilah pendidikan nilai menjadi perlu untuk diterapkan kembali didalam proses belajar mengajar agar manusia Indonesia mampu

menjawab tantangan global sekaligus bisa mengatasi beberapa persoalan domestik yang muncul kekancah pergaulan antar sesama warga negara. Inilah saatnya bagi sekolah-sekolah untuk kembali mengajarkan nilai-nilai moral dengan perspektif humanisme universal, nilai moral dengan perspektif semacam ini sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia.

Apapun sistem pendidikan yang dianut, tetap pusat perhatiannya harus bertumpu pada manusia dengan segala aspeknya. Pendidikan harus mengacu pada pembentukan manusia Indonesia yang bisa percaya pada diri sendiri, lingkungan dan bisa menempatkan diri di tengah lingkungan sosial. Secara positif, toleran dan adil nilai yang universal (sistem nilai) sangat perlu diterapkan.

Proses belajar mengajar merupakan dua kegiatan yang dijalani secara menunggal dalam satu kegiatan antara siswa dan guru. Sistem klasifikasi yang dijalani dalam proses belajar mengajar di Indonesia memiliki banyak kelemahan diantaranya sulit memberikan perhatian yang penuh kepada siswa secara individu. Perhatian guru lebih banyak secara global kepada peserta didik yang berada dalam satu lokal belajar.

Dengan demikian guru perlu mengetahui apakah siswa yang diajarnya terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar baik secara lahiriah maupun bathiniah. Secara lahiriah maksudnya siswa memang berada dikelas bersamaan dengan siswa lainnya. Secara bathiniah siswa di harapkan bukan saja berada di kelas tetapi pikiran siswa terkonsentrasi mengikuti dan menerima pelajaran yang disampaikan guru.

Di samping itu proses belajar mengajar memiliki beberapa langkah yang

harus dilalui oleh guru dimulai dari membuat program pengajaran (salah satunya dalam bentuk program satuan pelajar/SP) sampai kepada proses evaluasi. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan dalam satu kesatuan yang merupakan suatu sistem.

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar menurut Abu Ahmadi yaitu : (1). Kawasan kognitif, hendaknya mengutamakan pembinaan kemampuan memproses informasi atau konsep menjadi milik pribadinya yang dipahami, dimengerti dan diyakini serta secara baik, layak dan mantap, kemampuan tersebut hendaknya diproses melalui pola berpikir, kritis, analitis, interaktif dan evaluatif baik secara konvergen maupun divergen. Cara ini membutuhkan siswa untuk menerima sesuatu secara nalar/rasional. (2). Kawasan afektif, seyogyanya membina kepekaan dan keterlibatan seluruh potensi afeksinya untuk merasakan, menghayati, menilai dan berkemauan ,menyerap, sistem nilai (belief system) yang bersangkutan dibina melalui pola klarifikasi sehingga nilai baru yang masuk akan diterimanya secara baik dan mampu bersatu raga (personalized) dengan sistem nilai yang sudah ada dalam dirinya. Siswa akan mampu melakukan ini bila nilai baru itu merupakan keyakinan.

3. Kawasan Psikomotor, hendaknya dibina melalui pola proses latihan atau melakoni (experiencing) baik secara langsung (secara fisik) maupun dalam bentuk mind purposefull movement (gerak terarah secara abstrak : Anita Harrow .1972), aneka keterampilan melalui pola tadi yang melahirkan gerak atau keterampilan yang manipulatif dalam arti gerak keterampilan hasil belajar (learned behavior) dan bukan lagi gerak keterampilan yang reflektif.

Dalam teori domain ketiga unsur di atas menjadi andalan potensi belajar (kognitif, afektif dan psikomotor) masing-masing memiliki struktur dan komponen serta taksonomik tersendiri. Dalam pendidikan melalui beberapa program serta kegiatan, ketiga potensi itu dikembangkan, ditingkatkan, diperbaharui dan diperkaya. Pendidikan dan pengajaran adalah upaya perbermaknaan seluruh potensi tersebut. Jadi bukan hanya untuk satu domain saja apalagi bila satu domain itu tidak meliputi keseluruhan struktural.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita bahwa unsur afektif lebih sulit penerapannya dari dua unsur lainnya. Pengajaran nilai menghendaki lahirnya generasi muda yang memiliki sejumlah bekal sistem yang positif sebagai landasan dan barometer kehidupan dan lebih jauh lagi sebagai generasi pelurus dan pembaharu nilai moral yang diinginkan.

Pendidikan nilai atau pengajaran afektual adalah pembelajaran emosional siswa dalam upaya penanaman nilai-nilai yang universal ke dalam pribadi siswa. Oleh karena itu ada beberapa pra syarat untuk mengawali upaya pengajaran afektual atau pendidikan nilai sebagai berikut :

- a. Faktor guru, kesiapan kompetensi dan profesionalnya memadai diiringi pemahaman dan kemampuan menentukan nilai dan target nilai yang akan diterapkan. Guru harus mengenal kehidupan siswa serta lingkungannya.
- b. Faktor siswa yang harus dibina ialah : kemampuan bertanya, harus dipersiapkan untuk keterbukaan dan keberanian bereksresi.
- c. Suasana belajar juga harus diciptakan suasana hangat bebas, terbuka namun terkendali terarah serta humanistik.

Sekolah Menengah Umum (SMU 8 Pekanbaru), merupakan salah satu

SMU yang berkualitas, baik mengenai hasil belajar yang telah diraih maupun kegiatan extra kurikulemya, maupun kegiatan pembinaan terhadap siswa, bahkan sekolah ini sudah termasuk salah satu sekolah menengah umum dalam pembinaan khusus bahkan masyarakat menyebut dengan sekolah unggul.

Seperti yang dikatakan kepala SMU 8 Pekanbaru bahkan keunggulan SMU 8 Pekanbaru adalah dalam berbagai aspek termasuk kegiatan belajar mengajarnya salah satu dalam mata pelajaran PPKn. Perolehan nilai ebtanas murni (NEM) dalam kurun waktu 10 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Daftar NEM SMU 8 Pekanbaru.

M. Pel /thn	89/90	90/91	91/92	92/93	93/94	94/95	95/96	97/98	98/99	99/00	00/01
PPKN	7,91	7,54	7,77	8,01	7,93	7,89	7,26	7,34	7,5	7,97	7,98
B.Indonesia	6,69	6,60	6,08	6,97	7,19	7,64	7,63	7,28	7,4	7,53	5,97
Matematika	3,61	5,18	5,93	5,49	5,11	6,66	5,22	5,51	5,4	7,68	6,16
Biologi	5,46	5,75	5,92	5,75	6,64	5,24	6,42	6,63	5,7	6,89	6,45
Fisika	5,73	5,76	5,76	5,79	6,39	6,2	7,05	7,05	6,9	7,07	6,62
Kimia	5,30	5,68	5,44	6,44	5,70	6,03	6,44	6,44	7,2	6,60	7,7
Ekonomi	6,04	6,39	5,53	6,05	5,76	6,89	5,60	5,37	7	5,66	6,12
T. Negara	4,48	6,33	5,83	5,81	5,76	5,49	5,49	6,09	7,2	7,25	6,06
Sos. Antro	5,83	6,97	6,79	5,93	5,58	7,36	6,91	6,91	5	7,71	6,19
B. Inggris	5,10	6,18	6,90	6,90	5,55	6,55	6,94	6,94	6,9	6,09	7,22
Rata-rata	5,48	6,13	6,34	6,18	6,46	6,56	6,23	6,69	6,8	6,88	6,69

Sumber : Dokumentasi SMU 8 Pekanbaru.

Daftar NEM SMU 8 Pekanbaru seperti yang tercantum pada daftar diatas adalah perolehan NEM lulusan SMU 8 Pekanbaru pada bidang studi inti yang telah diperoleh selama 10 tahun sejak tahun ajaran 1989/1990 sampai dengan tahun ajaran 2000/2001. Jadi perolehan NEM adalah dalam jangka waktu yang begitu panjang sehingga dapat dilihat mutu tamatan yang baik.

Mempelajari dari keberhasilan SMU 8 inilah penulis merasa perlu mengadakan penelitian ini guna untuk melihat sejauhmana upaya guru mengembangkan nilai moral yang terkandung di dalam bahan pelajaran PPKn

yang dapat diimplementasikan didalam proses belajar mengajar.

B. Pemasalahan

Sejumlah hambatan dan problema akan selalu hadir dalam proses pendidikan terutama PPKn sebagai pendidikan nilai moral , diantaranya ialah :

1. Guru PPKn dituntut kemahiran menentukan dan membuat media stimulus yang ampuh dan berkadar tinggi sehingga mampu mengandung the instinctive participation yang aktif dan terbuka (terjangkau, bermakna, tingkat kesukaran)
2. Guru PPKn dituntut kemampuan membina proses kegiatan belajar siswa yang serasi sehingga tidak timbul gejala. Kemampuan guru sebagai fasilitator sangat menentukan untuk hal itu.
3. Guru PPKn mampu memelihara suasana belajar yang segar dan merangsang sehingga tidak menciptakan kebosanan dan kejenuhan. Kebosanan bisa muncul karena kelelahan jiwa dan kegiatan belajar kurang humanis dan kurang demokratis.

Berdasarkan hal diatas proses pembelajaran PPKn sebagai pendidikan nilai moral harus menyampaikan isi pesan nilai dan moral yang utuh dengan media program dan proses pembelajaran yang sesuai.

Dalam penelitian ini akan kaji tentang bagaimana upaya guru mengembangkan nilai moral dalam proses pembelajar PPKn. Untuk itu rumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya guru PPKn mengimplementasikan nilai moral dalam program pengajaran PPKn ?

2. Bagaimanakah upaya guru PPKn mengimplementasikan nilai moral dalam mekanisme pembelajaran PPKn ?
3. Bagaimanakah implementasikan nilai moral dalam proses tindak lanjut yang dilakukan oleh SMU 8 Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian mengenai bagaimana implementasi pendidikan nilai moral dalam proses pembelajar. Oleh karena itu tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Mengidentifikasi secara kongkrit pola pengembangan Proses pembelajar pada bidang studi PPKN.
2. Mengetahui upaya guru dalam mengimplementasikan pendidikan nilai dalam proses belajar mengajar.
3. Mengetahui upaya guru mengimplementasikan nilai moral dalam prosesn tindak lanjut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pedoman dalam upaya penerapan pendidikan nilai bagi proses belajar mengajar pada setiap bidang studi khususnya pada bidang studi wajib yang banyak memuat isi pesan moral dan nilai sehingga dalam proses belajar mengajar ada keseimbangan dalam pengembangan unsur kognitif, unsur afektif

dan unsur psikomotor.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah baik di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU). Secara rinci hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Bagi guru yang membina bidang studi atau mata pelajaran umum. Manfaat yang dimaksud sebagai bahan masukan atau umpan balik bagi guna penyempurnaan dan peningkatan implementasi nilai moral dalam pelaksanaan proses belajar mengajar terutama pada mata pelajaran umum.
- b. Bagi siswa dengan pendidikan nilai akan membantu siswa dalam membentuk kepribadian dan pola tingkahlaku yang baik sebagai hasil belajar.
- c. Bagi pimpinan sekolah sebagai bahan masukan dalam menetapkan kebijakan, perbaikan dan pengembangan kurikulum pendidikan. Disamping itu dapat pula dijadikan bahan masukan untuk lebih meningkatkan bimbingan dan pembinaan profesional guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mata pelajaran umum terutama dalam pengembangan nilai-nilai kehidupan dan nilai agama.
- d. Bagi para pakar pendidikan, temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi yang berharga dalam menemukan dan mengembangkan teori-teori pembelajaran khususnya teori-teori pendidikan nilai.

- e. Bagi pihak Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan berbagai model pengajaran serta meningkatkan kualitas profesionalisme guru mata pelajaran PPKn termasuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dengan demikian pendidikan nilai moral dapat diterapkan disemua jenjang dan jenis pendidikan.
- f. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk membahas dan mengkaji permasalahan penerapan pendidikan terutama penerapan pendidikan nilai dilembaga pendidikan formal.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan pengertian terhadap judul penelitian ini yaitu komplementer pendidikan nilai moral dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk memaparkan hakekat belajar dalam proses pembelajaran PPKn dalam perspektif Nilai moral yaitu :

1. Hakekat Belajar PPKn

Pengertian dan hakekat belajar, kiranya layak ditelaah kembali dengan seksama agar kegiatan belajar tersebut sesuai dengan target dan harapan. Berikut ini ditampilkan sejumlah rumusan belajar sekadar untuk mengingatkan kembali, ialah antara lain belajar adalah proses dialog antar potensi diri dengan berbagai media ajar dan melalui berbagai reka upaya kegiatan sehingga mampu

menyerap (menginternalisasi dan mempribadikan) bahan ajar menjadi milik dirinya.

Disamping itu belajar adalah proses transaksi atau interaksi antar struktur potensi diri dengan guru atau sesuatu sehingga terjadi proses internalisasi atau personalisasi sesuatu serta tercipta perubahan diri. Belajar juga di pandang sebagai proses kegiatan internalisasi sesuatu sehingga terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa.

Proses mendialogkan atau menginteraksikan potensi diri dan pilihan kegiatan, media dan sumber belajar akan sangat menentukan kualitas dan kuantitas hasil belajar. Oleh karena itu hendaknya disadari oleh kita bahwa dalam kita menentukan hasil belajar hendaknya jelas kualitas dan kuantitas yang diharapkan baik untuk hasil belajar utama maupun hasil belajar pengiringnya.

Demikian pula pada saat akan menentukan kegiatan belajar, sebab hal ini akan menentukan kadar kualitas kegiatan belajar siswa (KBS) dan hasil perolehannya.

2. Hakekat Pendidikan Nilai

Pengertian nilai terdapat keraguan pendapat nilai merupakan ide atau konsep mengenai apa yang penting dan bertaut dengan etika dan estetika. Nilai adalah tuntutan mengenai apa yang baik, benar, adil dan indah. Nilai merupakan standar untuk mempertimbangkan dan memilih perilaku apa yang pantas dan tidak pantas atau tidak baik dilakukan. Sebagai standar, nilai membantu seseorang menentukan apakah ia suka terhadap sesuatu atau tidak.



Dalam hal yang lebih kompleks, nilai akan membantu orang menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk tentang objek orang, ide, gaya prilaku dan yang lainnya (A. Kosasih Djahiri: 1989: 4).

Implementasi Pendidikan Nilai moral dalam penelitian ini dimaksudkan adalah bagaimana guru mengembangkan nilai ke dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar sarat dengan isi pelajaran anak sebab berdasarkan uraian di atas apapun bentuk dari nilai itu maka nilai merupakan hal yang dijunjung tinggi dan menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam perbuatan dan ucapan: pendidikan nilai maknanya dapat disimpulkan sebagai (a) Proses pembinaan, pengembangan dan perluasan wawasan struktur serta potensi dan pengalaman belajar manusia secara layak serta manusiawi. (b) Proses pembinaan, pengembangan dan perluasan isi substansi manusia secara layak dan manusia.

Dengan demikian pada hakekatnya pendidikan adalah proses membantu siswa untuk mengekspresikan nilai-nilai yang ada melalui pengujian kritikal sehingga mereka dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas berpikir dan perasaan mereka. Konsep ini telah menunjukkan tujuan pendidikan nilai yaitu membantu meningkatkan atau memperbaiki kualitas berpikir dan berperasaan. David Krathwohl menyatakan :

affective education is the process of helping students move up the affective value hierarchy from the lowest level of responding, valuing, organizing a value system, to the highest level process of helping students to development and internalize socially acceptable, morally mature values and attitudes. (Winecoff, 1988: 9)

Untuk memperjelas dan mempermudah penerapan pendidikan nilai maka berikut ini dijelaskan beberapa pembahagian nilai ;(1) Nilai relegius

berorientasi kepada nilai keimanan menjadikan nilai iman sebagai dasar dari segala pemikiran dan tindakan.(2) Nilai estetika, berorientasi kepada kehidupan berbagai objek baik yang bersipat ekonomi, maupun buatan manusia baik secara impresionistik maupun ekspresionistik.(3) Nilai politis/kekuasaan berorientasi kepada upaya untuk memperoleh kebebasan dan kekuatan dalam kelompok, menyatakan diri (self assertion) kompetisi mencapai superioritas, memperoleh harga diri dan kepercayaan diri, mempengaruhi orang lain. (4) Nilai sosial berorientasi kepada berbagai bentuk lingkungan sosial, sikap empirik, tanggung jawab terhadap kelompok, kasih sayang. Sikap loyal dan bersedia berkorban dan berpartisipasi didalam kehidupan. (5) Nilai pengetahuan berorientasi kepada pengetahuan secara objektif menekankan kepada kepada pemikiran logis melihat dasar dari setiap prinsip dalam pengetahuan dan kaitan antara prinsip antara prinsip ilmu pengetahuan dan kaitan antara prinsip satu dengan yang lain menekankan kepada kebulatan pemikiran. (6)Nilai ekonomis mengutamakan segi kegunaan atau manfaat (utility).Karakteristik nilai ini mempertahankan keseimbangan dan perkembangan hidup baik secara individu maupun secara kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk produksi dan pekerjaan.

Disamping beberapa pengertian diatas tentang pendidikan nilai dan pembahagian nilai terdapat juga proses pembelajaran pendidikan nilai diantara sasaran pendidikan nilai, pendekatan pendidikan nilai dan model-model pendidikan nilai.

3. Makna Proses Pembelajaran

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas berikut adalah langkah-langkah dalam proses belajar mengajar diantaranya :

- a. Merumuskan tujuan, dalam hal ini ada dua tujuan pembelajaran yaitu a). tujuan pembelajaran umum dan b) tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus suda termuat dalam garis-garis besar program pengajaran (GBPP) atau kurikulum dan tidak perlu lagi dirumuskan oleh guru sedangkan tujuan pembelajaran khusus harus dirumuskan oleh guru sendiri yang berdasarkan kepada tujuan pembelajaran umum dan bahan pelajaran yang akan disajikan. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran khusus guru harus berpedoman kepada ketentuan dan tehnik merumuskan tujuan pembelajaran khusus.
- b. Merumuskan materi pelajaran. Untuk merumuskan materi pelajaran guru harus berpedoman kepada garis-garis besar program pengajaran (GBPP) untuk menentukan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang akan diajarkan kemudian baru dirumuskan materi pelajaran. Materi yang dirumuskan guru harus menunjang tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- c. Merumuskan kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan belajar mengajar harus dirumuskan sendiri oleh guru. Kegiatan belajar mengajar pada hakekatnya adalah segala sesuatu yang akan dilakukan guru dalam proses belajar mengajar dalam satu kali pertemuan. Kegiatan belajar mengajar adalah seluruh rangkaian kegiatan guru dalam mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar.

- d. Memilih metode, metode ada cara dan langkah yang ditempuh oleh guru dalam menyampaikan suatu materi pelajaran. Oleh karena metode pengajaran itu banyak dan tidak ada satu metodepun yang paling efektif untuk bisa digunakan semua materi pelajaran maka guru harus memilih beberapa metode yang sesuai.
- e. Memilih media pengajaran. Media pengajaran merupakan alat bantu untuk memudahkan guru menyampaikan materi pelajaran termasuk sumber bacaan yang dipergunakan guru.
- f. Evaluasi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa menerima dan menyerap materi yang telah disampaikan guru oleh karena itu evaluasi merupakan gambaran kemampuan siswa.

4. Proses Belajar Mengajar PPKn

Proses pembelajar berasal dari kata belajar adalah merupakan suatu aktivitas para peserta didik sebagai akibat dari adanya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pengajar dan siswa (S. Nasution, 1983 : 9)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur kehidupan dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk cipta Tuhan Yang Maha Esa (Depdikbud, 1994 : 2)

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pembelajaran PPKn memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan mata pelajaran lainnya, oleh karena

dalam mata pelajaran PPKn selain mengembangkan aspek kognitif siswa juga lebih mengungkapkan aspek afektif yaitu sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu dalam pembelajaran PPKn dituntut keteladanan dan kedisiplinan yang ditunjukkan oleh pengajar PPKn sebagai realisasi dari tanggung jawab terhadap materi yang diajarkan dalam proses belajar mengajar.

Sesuai dengan ciri khas atau karakteristik pembelajaran PPKn di atas yaitu mengembangkan nilai-nilai luhur dan moral bangsa Indonesia, maka materi pembelajaran PPKn lebih banyak mengungkapkan konsep-konsep yang merupakan pencerminan nilai-nilai luhur dan moral Pancasila tersebut.

F. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif naturalistik sesuai dengan aspek yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengamati manusia dalam situasi nyata baik dalam lingkungan berinteraksi maupun untuk memahami perilaku orang yang diamati

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menggambarkan pada kondisi sosial yang ditandai oleh adanya tiga unsur, yaitu ; tempat, pelaku dan kegiatan (Nasution, 1992 ; 43). Dengan demikian yang dimaksud dengan lokasi penelitian disini yaitu :tempat penelitian ialah SMU 8 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Abdul Muis Pekanbaru.

2.Objek Penelitian

Sesuai dengan konteks permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah kepala SMU 8 Pekanbaru, 1 orang wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan 1 orang wakil kepala sekolah bidang, 3 orang guru PPKn dan 4 orang siswa

